MANEJEMEN SUMBER DAYA BUDAYA KOTA MAKASSAR *"MENUJU STATUS KOTA DUNIA"*

BUDIANTO HAKIM
(Balai Arkeologi Makassar)

1. PENDAHULUAN

Dalam era Millenium III ditandai dengan dunia yang semakin *bordeless*. Pasar terbuka dengan berlakunya liberalisme perdagangan dunia. Kota-kota di dunia berlomba meraih *"World Status"* dalam perjuangan merebut keunggulan posisi pada persaingan ekonomi global. Survival merupakan esensi perjuangan, perubahan merupakan kata kunci mekanisme survival yang dibutuhkan oleh sebuah kota.

Dalam merebut status kota dunia, kota harus berdaya tarik kuat untuk menarik pariwisata, bisnis dan investasi. Ini berarti bahwa kota harus berkemampuan membangun citra dirinya. Kota-kota di dunia bersaing adu pamor dan gengsi dengan mengangkat kekuatan citra, jatidiri, kepribadian dan semangat kota, yang digali dari perjalanan sejarah kota, bangsa dan negara. Kota masa lalu diangkat sebagai elemen kota berdaya tarik kuat, sebagai monumen sejarah sebuah kota yang dijual bagi promosi kota tersebut dalam kemasan yang bernama *"Landmark"* kota (Yuwono, 2005: 1).

Suatu sosok yang simbolik mencerminkan jati diri, kepribadian, ciri, karakter yang diperlukan sebagai kekuatan citra sebuah kota dalam persaingan merebut perhatian di tengah-tengah iklim kompetisi yang keras dan tercipta oleh manusia pada era global ini. Beberapa contoh kota masa lalu yang diangkat sebagai landmark kebanggaan sebuah kota yang terkenal, sebagai misal Kota lama Paris dengan menara "Eiffel"-nya, Kota Sidney dengan "Sidney Bridge"-nya, Kota Amsterdam dengan "Gedung Tepi Kali dan Jembatan Kecilnya", Kota lama Manhattam, New York dengan "Empire State"-nya, "Parthenon" di bukit Acropolis, Spanyol dan lain-lain. Kesemuanya berdaya tarik yang fantastis oleh kekayaan sejarah-budaya yang

dimilikinya serta keberadaan "sungai" sebagai elemen penting dalam sebuah kota yang dapat membingkainya. Kota-kota tersebut di atas tidak lain adalah sebuah kota yang melestarikan dan mendayagunakan peninggalan arkeologisnya, khususnya bangunan bersejarahnya sebagai sebuah ciri, citra dan lambang kebanggaan kotanya. Sejalan dengan itu, lalu apa dengan kota Makassar ?. Pertanyaan ini sangat menggelitik sekaligus menantang kita semua untuk mencari jatidiri Makassar di masa lalu.

2. ENTITAS BUDAYA (SEBAGAI ALTERNATIF DAN INSPIRATOR MENUJU SEBUAH KOTA WISATA)

Apabila memperhatikan grafik jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dengan daerah tujuan Indonesia (khususnya Sulawesi Selatan) dalam lima tahun terakhir ini, maka kita akan terkejut karena grafik tersebut memperlihatkan penurunan yang sangat drastis. Apa penyebabnya ?, banyak faktor yang diajukan untuk menjawab pertanyaan itu. Salah satunya adalah dengan melihat hubungan yang signifikan antara kondisi kepariwisataan nasional dengan kondisi negara kita. Hubungan lainnya dapat dilihat dari ketidak-mampuan negara dan wilayah-wilayah di tingkat daerah menerapkan model pengelolaan pariwisata yang efektif dan penentuan objek wisata yang tidak menarik bagi wisatawan.

Sesungguhnya kepariwisataan Indonesia tidak lain bertumpu pada tiga modal pokok, yaitu alam, budaya dan manusianya. Ketiga modal tersebut adalah inti dari hakekat kepariwisataan itu sendiri, yang sekaligus menjadi rujukan dalam merumuskan model dan strategi tumpuan pengelolaan pariwisata yang tepat guna. Hubungan ketiga modal di atas tidak lain adalah keunikan dan kekhasan yang bisa diajukan untuk menarik para wisatawan.

Keunggulan-keunggulan geografis (termasuk dalam hal ini keadaan ekologis dan morfologis) yang dimiliki oleh Indonesia (Sulawesi Selatan khususnya), disatu sisi tidak lantas menjadi jaminan ketertarikan wisatawan untuk masuk ke Indonesia atau Sulawesi Selatan. Karena kenyataan alamiah menunjukkan bahwa Indonesia bukan satu-satunya negara yang berada di daerah garis Khatulistiwa atau daerah tropis dengan spesifikasi keindahan alam tertentu. Dengan demikian, format kepariwisataan yang selama ini lebih mengandalkan pada modal kekayaan, keindahan dan keunikan alam atau geografis harus dikaji ulang. Ada modal lain yang sampai saat ini belum tersentuh secara baik karena pengelolaannya belum

dilaksanakan secara maksimal. Modal tersebut adalah modal sejarah-kebudayaan yang setiap daerah di Indonesia (termasuk Sulawesi Selatan) memiliki kekhasan masing-masing. Modal kebudayaan adalah juga termasuk sumber ekonomi bila dikelola dengan baik, terutama sebagai objek wisata yang diharapkan menjadi sumber devisa negara atau daerah yang sangat besar.

Formula yang mesti disusun untuk mengefektifkan modal itu, terletak pada strategi kolektif dari masyarakat Indonesia itu sendiri, yakni masyarakat sebagai dasar dan pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator. Sementara strategi dan teknik yang bermain di dalamnya dapat diformulasikan ke dalam kerangka sektoral.

Dalam rangka penggalangan kepariwisataan nasional oleh pemerintah yang baru (pemerintahan SBY-JK atau Kabinet Gotong Royong), melalui kebijakan pembentukan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, telah menangkap sinyal keterpurukan ekonomi yang salah satu sebabnya adalah mundurnya perolehan devisa dari sektor pariwisata. Di lain pihak, bahwa gabungan dua bidang yakni budaya dan pariwisata adalah objek garapan yang menjadi perhatian pemerintah dengan orientasi dan makna yang saling bertolak belakang. Disatu sisi, penempatan kebudayaan sebagai tugas pemerintah (sekaligus tugas seluruh rakyat) tidak dapat melepaskan diri dari paradigma, bahwa kebudayaan harus tetap dipertahankan dan dilestarikan, yang bersumber dari rumusan dasar kebudayaan itu sendiri, yakni: keseluruhan gagasan, perilaku dan benda sebagai perwujudan kemampuan manusia menyesuaikan diri secara aktif terhadap lingkungannya dalam arti luas. Dalam format politik nasional, sebagaimana yang diarahkan oleh GBHN tentang pembangunan kebudayaan. Dalam rumusan GBHN tersebut setidaknya dapat dicermati dalam tiga hal, yaitu: (1) kebudayaan nasional (termasuk tinggalan arkeologis secara keseluruhan) berfungsi dan berperan sebagai tumpuan ideologi pemersatu, sekaligus fundamen menuju ke pembentukan peradaban Indonesia di masa yang akan datang; (2) mendorong terciptanya suatu semangat kebudayaan yang berkualitas bagi seluruh bangsa Indonesia; (3) dapat dipandang sebagai kesempatan bagi terselenggaranya promosi-promosi budaya dalam rangka persahabatan selaligus menguntungkan secara ekonomi bagi daerah yang bersangkutan.

Kepariwisataan budaya di Indonesia sebenarnya memiliki prospek yang cerah. Oleh karena itu, kandungan berupa budaya (beserta hasilnya) dan alamnya dapat dikelola sebagai salah satu investasi yang berharga bagi daerah dan masya-

rakatnya. Untuk menggali potensi yang begitu berharga diperlukan suatu strategi penanganan yang dapat mengoptimalisasikan peranannya dalam menunjang pendapatan asli daerah (PAD). Demikian halnya dengan daerah yang memiliki banyak sumber budaya dengan prospek pengembangan yang lebih menjanjikan harapan di masa mendatang. Keberhasilannya sangat ditentukan oleh adanya penanganan dari semua pihak. Keanekaragaman budaya yang ditunjang oleh panorama yang indah merupakan salah satu kekayaan besar yang dimiliki oleh suatu daerah atau kota. Permasalahannya bahwa bagaimana mengaktualisasikan harapan kita berkaitan dengan semua kekayaan daerah tersebut. Tentunya kita harapkan agar potensi daerah yang begitu besar dapat diangkat dan memiliki nilai jual untuk dapat menunjang pembangunan daerahnya. Untuk tujuan itu, salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang memiliki potensi besar dari sektor tinggalan arkeologis, baik situs, artefak (yang dapat berpindah dan monumen atau bangunan), ekofak dan fitur adalah Kota Makassar.

3. MAKASSAR "RIWAYATMU DULU"

Pertanyaan pertama kali yang harus dijawab bahwa kapan sebenarnya kota Makassar dimulai dan dimana daerah okupasinya ?. Dalam penelusuran data sejarah, seperti Kekawin Majapahit "Negarakertagama (1365 M)" yang dikarang oleh Empu Prapanca menyebutkan bahwa beberapa kerajaan di Sulawesi menjadi kerajaan yang mapan dan menjadi sahabat Kerajaan Majapahit, salah satunya adalah Kerajaan Makassar. Selain itu, dalam naskah sejarah kerajaan Bima disebutkan bahwa semua daerah di antara Pulau Sumbawa disebut Makassar. Tapi kemungkinan catatan sejarah Bima itu diambil dari peta perjalanan yang dibuat oleh pelaut Potugis yang menempatkan seluruh kawasan di bagian utara dalam pelayaran antara Malaka ke Maluku diberi nama *de Maccazar* (Pulau Makassar besar), sementara Pulau Sulawesi disebut *Ilhas dos Maccazar* (pulau-pulau Makassar). Jika data tersebut dihubungkan dengan kedudukan Bandar Makassar dan Kerajaan Makassar yang dalam perkembangannya di tempatkan menjadi satu-satunya Bandar terpenting dalam pelayaran ke Maluku, dan kerajaan Makassar terpenting yang memiliki pengaruh yang luas di kawasan pulau-pulau di bagian utara Sumbawa itu, maka dapat diakatakan bahwa penamaan itu berkaitan dengan kedudukan dari Bandar dan Kerajaan itu di kawasan jalur utara pelayaran Malaka-Maluku. (Polinggomang, 2004: 4). Selanjutnya dari beberapa data sejarah yang lain dan data arkeologis di beberapa

kawasan di Asia Tenggara ataupun Nusantara menunjukkan eksistensi para pelaut dan pedagang Bugis-Makassar, sebut saja data arkeologis (sebuah makam tua di Brunei) yang nisannya beraksara lontara Bugis-Makassar. Pada nisan itu terbaca seorang nama Nahkoda dan daerah asalnya,. Yaitu Penrang dan Wajo. (Komunikasi Pribadi dengan Kholid Sodrie, 2007).

Kota Makassar pada awal pembentukannya adalah pengembangan dan perluasan wilayah kota pelabuhan Somba Opu di bagian selatan dan Kota pelabuhan Tallo di bagian utara. Kota pelebuhan Somba opu terletak pada percabangan (delta) muara Sungai Jeneberang dan Kota pelabuhan Tallo berada di sisi selatan muara Sungai Bira (Sungai Tallo). Dua aliran sungai itu bermuara di Selat Makassar, dan dua Bandar ini berada pada pesisir barat Jazirah selatan Pulau Sulawesi, sehingga merupakan Bandar yang menghadap ke arah barat, ke arah matahari terbenam. Dan patut diakui dengan posisi itu menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi pengunjung kota Makassar dari waktu yang lampau hingga kini. Bukti tertsebut terlihat bahwa jauh sebelum priode kompeni di Makassar, di antara kedua pesisir itu, sudah banyak pemukim dari luar yang menetap di daerah tersebut sebagai pedagang. Pemukim yang dimaksud, antara lain datang dari Melayu, Portugis (1532), Belanda (1607), Inggeris (1613), Denmark (1618), Spanyol (1615) dan Cina (1618) (Polinggomang, 2005: 3).

Dari posisi tersebut pula, sehingga menempatkan Bandar Makassar menjadi Bandar terpenting dan pusat perdagangan transito internasional dalam dunia perdagangan maritim pada akhir abad ke-16 hingga paruh pertama abad ke-17. Makassar menjadi pusat niaga untuk pelaut dan pedagang di Asia dan Eropa dalam komoditas rempah-rempah. Dalam salah satu catatan harian pegawai VOC tahun 1624 yang dikutip oleh Jacob Cornelis van Leaur menyatakan bahwa "semua pedagang Merayu dan Asing lainnya, lebih dari 600 pedagang mempersiapkan diri untuk berlayar lagi, mengikuti datangnya muson barat. Kebanyakan dengan perahu kecil, biasa untuk perdagangan rempah-rempah menuju Ambonia dan daerah sekitarnya dengan modal besar yang mereka bawa, sebagian berupa beras, tetapi kebanyakan beruapa alat tukar. Keuntungan tahun lalu mendorong mereka untuk tekun dan bersemangat dengan harapan kembali memperoleh keuntungan yang lebih dari tahun lalu, dikaitkan pula bahwa Raja Makassar mengirim dua orang pemimpin di antara mereka dengan tanggung jawab utama, bila penduduk Ambonia dan sekitarnya membutuhkan bantuan, mereka akan menolong sepenuhnya seperti dahulu, sesuai dengan kemampuan mereka".

Selain pengorganisasian perdagangan maritim ke Maluku, Kerajaan Makassar juga dikenal telah menjadi Bandar Transito international dalam perdagangan rempah-rempah dan kayu cendana. Semua pedagang Asia dan Eropa datang dan memiliki perwakilan dagang (loji) di Bandar ini. Hal itu memberikan gambaran kemajuan yang laur biasa, sehingga sejarawan Australia, Anthony Reid menyatakan bahwa kisah kemajuan perdagangan Makassar sekitar abad ke-17 merupakan kisah keberhasilan yang tiada bandingnya dalam sejarah Indonesia (Polinggomang, 2005: 5).

4. SUMBERDAYA ARKEOLOGIS DI MAKASSAR DAN IMPLEMENTASINYA

Disebut sebagai sumber daya, karena objek-objek arkeologi itu merupakan salah satu modal pokok dalam pembangunan, bersama-sama dengan sumber daya lainnya, seperti sumber daya alam dan sumber daya binaan. Berdasarkan penjamanan atau periodesasinya sumber daya arkeologi dapat dibedakan, sebagai berikut:

(1) sumber daya arkeologi dari masa prasejarah, antara lain alat-alat batu (kapak genggam atau chopper, kapak perimbas, kapak lonjong, kapak persegi, mata panah dan serpih-bilah); perhiasan dari batu (manik-manik, gelang, cincin); perhiasan dan peralatan dari tulang dan kerang (panah, pisau, sendok, penggaruk, mata kail, manik-manik, gelang, bandul kalung dsb); sisa-sisa jasad manusia, hewan dan tumbuhan yang terawetkan secara alamiah (kebanyakan telah membatu atau memfosil) yang mempunyai konteks dengan kehidupan manusia masa lalu. Jenis-jenis sumber daya arkeologi seperti yang disebut di atas di dalam undang-undang Nomor. 5 tahun 1992 diklasifikasi sebagai benda bergerak (movable artefacts). Benda bergerak dari masa prasejarah lainnya ialah perkakas rumah tangga, senjata, ataupun perhiasan yang dibuat dari tanah liat, seperti periuk dan jenis gerabah lainnya, artefak dari logam, baik yang terbuat dari bahan emas, perunggu, perak maupun besi terdiri jenis perhiasan, senjata, alat rumah tangga, alat pertanian dll. Sedang sumber daya arkeologi yang tidak bergerak (unmovable artefacts), antara lain gua-gua prasejarah termasuk lukisan dindingnya, kubur-kubur batu (sarkopagus, kalamba, pandusa, waruga dsb), dolmen, punden beruindak, menhir, arca menhir dan sebagainya

(2) sumber daya arkeologi dari masa pengaruh Hindu-Budha, sering disebut masa klasik Indonesia, seperti bangunan sakral (candi,,

pura dll), bangunan profan (rumah, gapura, istana, kolam, petirtaan dsb) dan beberapa jenis artefak lainnya, seperti prasasti, arca, peralatan rumah tangga (tanah liat, keramik, logam) dan naskah-naskah tertulis.

(3) sumber daya arkeologi dari masa Islam. Pada masa ini kehidupan manusia telah berkembang pesat yang ditandai dengan berdirinya kerajaan-kerajaan beserta istana-nya, sehingga jenis peralatan dan perkakas untuk kebutuhan hidup manusia juga bertambah lebih banyak dibanding dari masa sebelumnya. Benda bergerak dari masa Islam, antara lain Al Quran dan kitab-kitab keagamaan yang berasal dari masa awal masuknya Islam ke Indonesia. Artefak lain ialah perkakas ataupun peralatan rumah tangga, baik yang terbuat dari tanah, kayu, kaca, logam dan keramik. Di samping itu adapula beruapa istana, rumah-rumah tinggal bangsawan dan penduduk biasa yang masing-masing mempunyai ciri arsitektur, termasuk pula sumber daya arkeologi yang tidak bergerak lainnya, seperti taman sari, surau, sumur kuna, dan kolam air.

(4) sumber daya arkeologi dari masa kolonial, didominasi oleh jenis benda tak bergerak, seperti bangunan yang arsitekturnya berciri eropa, terutama yang pernah menjajah di Indonesia (Belanda, Inggris, Portugis). Bangunan dari bangsa-baangsa tersebut biasa disebut juga dengan istilah bangunan "Indis", yaitu bangunan bergaya arsitektur antara budaya barat dan timur (khususnya Jawa). Selain itu, juga terdapat bangunan yang merupakan perpaduan arsitektur lokal dengan asing, seperti bangunan Cina, Jepang dan Arab. Bangunan dari masa kolonial dibeberapa tempat di Indonesia perkembangannya seiring dan sejalan dengan perkembangan dari kota itu sendiri, sehingga sejarah sebuah kota akan diawali dengan dibangunnya gedung-gedung, baik untuk perkantoran, perumahan atau fasilitas lainnya. Bangunan dari masa kolonial dapat dikelompokkan menjadi bangunan perkantoran, fasilitas perdagangan, bangunan militer, bangunan kesehatan, bangunan tempat tinggal, bangunan peribadatan, bangunan pertokoan, bangunan olah raga, bangunan perhubungan, dan bangunan kesenian (Gunadi, 2001: 10-12).

Penjelasan di atas, diketahui bahwa sumber daya arkeologi memiliki jenis dan periodesasi nyang berbeda. Di wilayah Makassar terdapat banyak potensi arkeologis, seperti yang dipaparkan di atas, antara lain tinggalan arkeologi dari masa prasejarah (situs neolitik yang tersebar di beberapa tempat di Kecamatan Biringkanaya dan Manggala), masa Islam (benteng Tallo, benteng Somba opu, benteng Jumpandang atau Rotterdam, makam kuno Lommo Ri antang, makam kuno di Pulau Barang Lompo dll, sedang tinggalan dari masa

kolonial merupakan potensi arkeologi yang sangat dominan di wilayah Makassar, misalnya Gedung Mulo (sekarang Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Sulawesi Selatan), gedung raad van Justitia (sekarang Kantor Pengadilan di jalan Riburane),gedung Mascapai di jalan sangir, asrama Gowani di jalan Amamnagappa dan lain-lain (Ghadafi, 2004: 75). Oleh karena itu, adanya potensi arkeologi di Makassar tersebut diperlukan langkah-langkah kongkrit, sebagai missal segera mungkin membuat pangkalan data (data base) tentang sumber daya arkeologi yang ada di wilayah Makassar. Selain itu, juga penting untuk mebuat ploting dan zoning sumberdaya arkeologi Makassar. Tentu saja dengan tersedianya data seperti ini akan memudahkan bagi setiap pengguna data.

5. OUTPUT MANAJEMEN SUMBER DAYA ARKEOLOGI

(1) sarana pembangunan berwawasan budaya dan identitas
(2) sarana pengintegrasian antara bangunan kuno dan bangunan baru
(3) acuan pembangunan yang mengakomodasi dimensi waktu
(4) sebagai sarana dasar dalam pemanfaatan keunikan sumber daya arkeologi untuk dijadikan daya tarik penghasil PAD dan devisa negara atau daerah melalui pelestarian sumber daya arkeologi seabagai tujuan wisata
(5) sebagai sarana pembangunan nation dan karakter building yang mengekspresi gengsi, pamor serta keperibadian kota, bangsa dan negara, dan
(6) sebagai acuan strategis dalam pembangunan landmark yang simbolik untuk mengangkat kebanggaan kota Makassar (civic pride dan national pride).

Pengelolaan sumber daya arkeologi dengan baik di wilayah Makassar tentu saja dapat menjadi acuan dalam membuat atau merancang masterplan pembangunan kota Makassar yang mengakomodasi seluruh potensi sumber daya yang ada, termasuk sumber daya arkeologi. Dalam kaidah pelestarian sumber daya arkeologi, komponen-komponen strategis yang perlu dilindungi, antara lain : nilai karakteristik lingkungan beserta bangunan di dalamnya, citra kejiwaan atau roh lokasi sebagai legenda lokasi (baik itu mitos, tradisi sejarah, yang mewarnai nilai-nilai sosial-budaya masayarakat lokal),

tradisi budaya masyarakat setempat, aspirasi kebutuhan dan tuntutan pembangunan masa depan masyarakat lokal pendukung budaya, dan perlindungan kualitas hidup masyarakat lokal pendukung budaya.

6. PENUTUP

Kompleksitas komplik kepentingan yang terjadi di wilayah perkotaan bukanlah hal yang mudah untuk dijembatani. Perencana kota dalam hal ini pemerintah beserta stekholder lainnya (arsitek, pelestari budaya, masyarakat dan semua pihak yang terkait) hendaknya duduk bersama untuk memikirkan hal yang terbaik, sehingga akan tercipta sebuah kota yang merupakan suatu kesatuan sistem organisasi, baik yang bersifat sosial, visual, maupun fisik yang terancang secara terpadu. Suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan perencana kota dan arsitek adalah merancang dengan kesadaran akan sebuah keharmonisan. Sebab kota tidak hanya direncanakan akan tetaapi juga harus dirancang, Kebijaksanaan perencanaan kota dengan produk-produk perencanaan fisiknya harusnya mampu membangkitkan image sebagai sebuah kota dalam jangka waktu panjang. Selebihnya, biarkan warga kota menikamti karya itu, jika kualitasnya buruk, relakan untuk disingkirkan melalui wacana publik yang sehat.

Begitu pula dengan jajaran pelestari warisan budaya, seharusnya mampu mengupayakan arahan pelestarian dengan menjabarkan konsep pelestarian yang bukan hanya menuju kepada "proteectionist" melainkan lebih kepada konsep pelestarian yang simultan dan sinergis antara preservasi dan integreted development. Hal ini berarti bahwa pengembangan pelestarian harus diringi dengan konsep "pemasaran" pemanfaatan dan pengelolaan yang komprehensif. Dengan demikian, Makassar sebagai salah satu dari 5 kota menjadi destinasi unggulan di Indonesia yang telah ditetapkan oleh Departeman Kebudayaan dan Pariwisata, seyogyanya pemerintah kota Makassar tanggap dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menggali semua potensi kepariwisataannya, termasuk di antaranya potensi wisata budaya yang cukup beragam itu.

DAFTAR ACUAN

Gunadi, Kasnowiharjo, 2001. manajemen Sumber Daya Arkeologi: Lephas Unhas.

Gunadi, 1997, "Kelestarian dan Pelestraian Bangunan Indis di Jawa Tangah". DIA VIII.

Ghadafi, 2004, "Bangunan Indis Makassar Pelestarian dan Promlematikanya" Walanae No, 11. Balai Arkeologi Makassar

Palinggomang, Edward, 2005 Sejarah Bandar Makassar. Makalah dalam Pembentukan Asosiasi Pantai Kuno.

Sumalyono, Yulianto, 1999. Panggung Sejarah: Ujung Pandang Perkembangan Kota dan Arsitektur pada Akhir Abad 17 hingga Awal Abad 20. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.